



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan rahmat-Nya telah diselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dimana Penyusunan tersebut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 mengacu pada RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 171 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomo 96 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dimana perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta dinamika sosial ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Matriks Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 disusun berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta telah menggunakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode akhir Tahun 2021 yang tengah berjalan saat ini, serta dapat mencapai hasil yang baik dalam pengembangan bidang kepegawaian.

Pontianak, 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650602 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi.....	ii
DAFTAR Tabel.....	iii
BAB1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Dokumen Renja	5
BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DAerah	21
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	36
III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	36
III.3 Program dan Kegiatan	37
Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
Bab 5 PENUTUP	40
LAMPIRAN	
• Rencana Kerja BKD Prov Kalbar TA. 2021	
• Pemetaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Permendagri 90 Tahun 2019.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019.....	7
Tabel 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2019	17
Tabel 3. Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2017– 2019	19
Tabel 4. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2021	24

BAB1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dimana sistematis penyusunannya disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; perumusan rancangan akhir; dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan perubahan terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 171 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomo 96 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dimana perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta dinamika sosial ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Dalam proses penyusunan Renja ini telah disesuaikan dengan **perubahan nomenkelatur Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar yang telah ditetapkan pada Tahun 2019**, hasil rapat-rapat kerja atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang melibatkan instansi dan stakeholder terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor ,

koordinasi antar OPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, RENJA Perubahan Tahun 2021 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan tahun ke-tiga RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimana mengakomodir 2 (dua) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - b. Mutasi dan Promosi ASN;
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN; dan
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Perubahan 2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomer 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomer 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 28 September 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2016 tanggal 12 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 171 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomo 96 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dimana perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta dinamika sosial ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1 MAKSUD

- a. Pedoman dan dasar penyusunan perubahan kegiatan pada periode akhir Tahun 2021 yang tengah berjalan saat ini.
- b. Acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun periode akhir 2021 yang tengah berjalan saat ini.

I.3.2 TUJUAN

- a. Penjabaran atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran indikatif.
- b. Menyesuaikan kembali program kerja Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 mengikuti perubahan kebijakan dan dinamika social ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat saat ini.

I.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA

Dokumen Renja 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja

- III.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.4. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan

Bab V. Penutup

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019

TABEL 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	4	Penunjang				3,459,818,771	82.53	907,069,895	82.53	3,342,964,994		96.62
	4.03	KEPEGAWAIAN				3,459,818,771	13.39	907,069,895	13.39	3,342,964,994		96.62
	4.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,694,663,271	99.13	414,926,895	99.13	1,679,930,719		99.13
1	4.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100 Paket	3,064,887	100.00	2,342,887	100.00	3,064,887		100.00	
2	4.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Pelayanan Telepon dan Internet	12 Bulan	241,000,000	99.20	59,773,650	99.20	239,076,350		99.20	
3	4.03.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	2 Unit Mobil	8,320,000	94.78	3,239,300	94.78	7,886,100		94.78	
4	4.03.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersedianya Jumlah Materai	1000 Buah	5,250,000	100.00	370,000	100.00	5,250,000		100.00	
5	4.03.01.01.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis - Jenis ATK BKD Prov.Kalbar	54 Jenis ATK	111,384,000	99.82	22,541,300	99.82	111,179,000		99.82	
6	4.03.01.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis - Jenis Belanja Cetak dan Pengandaan Keperluan Kantor	30 Jenis Belanja Cetak dan 101.000 Lembar	159,094,000	99.94	21,800,000	99.94	159,005,000		99.94	
7	4.03.01.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jenis Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis alat Listrik dan elektronik	11,250,000	100.00	960,000	100.00	11,250,000		100.00	
8	4.03.01.01.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis Kelengkapan Kantor	111,058,350	99.92	22,225,000	99.92	110,968,350		99.92	
9	4.03.01.01.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis Peralatan Rumah Tangga	17,000,000	100.00	2,504,000	100.00	17,000,000		100.00	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
10	4.03.01.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar atau majalah	8030 exemplar Surat Kabar/Majalah	29,920,000	91.63	7,415,000	91.63	27,415,000		91.63
11	4.03.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman untuk tamu dan peserta rapat	850 Orang	62,475,050	98.48	14,151,000	98.48	61,526,050		98.48
12	4.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Laporan Perjalanan Dinas dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	70 Laporan	362,072,821	98.80	116,497,700	98.80	357,737,750		98.80
13	4.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 Orang	347,010,163	99.60	86,402,058	99.60	345,608,232		99.60
14	4.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Tata Usaha Keuangan dan Barang	13 Orang	96,300,000	97.09	24,075,000	97.09	93,500,000		97.09
15	4.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	4 Spanduk	4,000,000	100.00	800,000	100.00	4,000,000		100.00
16	4.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya Arsip Kantor	500 Arsip	63,506,000	100.00	14,085,000	100.00	63,506,000		100.00
17	4.03.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Updating Informasi Tentang Kepegawaian	12 Bulan	61,958,000	100.00	15,745,000	100.00	61,958,000		100.00
	4.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		499,607,500	69.43	213,484,800	69.43	437,376,925		87.54
18	4.03.01.01.02.07	Pengadaan AC / Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin ruangan	10 Unit AC	96,000,000	0.00	0	100.00	36,000,000		37.50
19	4.03.01.01.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Tersedianya Perlengkapan /Peralatan Kantor	6 Unit	264,967,500	99.16	197,656,000	99.16	262,746,000		99.16
20	4.03.01.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	2 Unit	7,900,000	0.00	0	100.00	7,900,000		100.00

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
21	4.03.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Webside Infomasi BKD Prov.Kalbar	1 Aplikasi	7,000,000	0.00	0	100.00	7,000,000		100.00
22	4.03.01.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2 Kendaraan Dinas	51,740,000	99.98	13,128,800	99.98	51,730,925		99.98
23	4.03.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	84 Unit	32,400,000	100.00	2,700,000	100.00	32,400,000		100.00
24	4.03.01.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Komputer dan Printer Kantor	78 Unit	39,600,000	0.00	0	100.00	39,600,000		100.00
	4.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		212,258,450	61.13	39,833,900	81.86	204,440,700		96.32
25	4.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS di Lingkungan BKD Prov.Kalbar	3 Orang	39,040,600	0.00	0	100.00	39,040,600		100.00
26	4.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Keikutsertaan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	15 Orang	45,962,050	85.80	17,555,900	85.80	39,434,300		85.80
27	4.03.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	PAK Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian yang telah dilakukan penilaian	10 Orang	66,958,800	98.73	15,028,000	98.73	66,108,800		98.73
28	4.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Dokumen Anjab BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	15,356,000	0.00	0	99.35	15,256,000		99.35
29	4.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	1 Dokumen	20,386,000	0.00	0	100.00	20,386,000		100.00
30	4.03.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen SOP BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	24,555,000	98.62	7,250,000	98.62	24,215,000		98.62

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga		390,026,000	60.42	45,825,000	85.34	378,671,000		97.09
31	4.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Penyusunan Laporan semester I dan II Keuangan BKD	2 Dokumen	34,513,000	0.00	0	67.29	23,223,000		67.29
32	4.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan Laporan semester I dan II Keuangan BKD	2 Dokumen	30,545,000	0.00	0	100.00	30,545,000		100.00
33	4.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Dokumen RENSTRA BKD 2019-2023	1 Dokumen	25,100,000	0.00	0	100.00	25,100,000		100.00
34	4.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan Renja Kerja BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	29,660,000	0.00	0	100.00	29,660,000		100.00
35	4.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan Renja Kerja BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	34,490,000	0.00	0	100.00	34,490,000		100.00
36	4.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	74,634,000	100.00	16,005,000	100.00	74,634,000		100.00
37	4.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA dan DPA BKD Prov.Kalbar	2 Dokumen	34,499,000	99.81	400,000	99.81	34,434,000		99.81
38	4.03.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	50,862,000	100.00	10,245,000	100.00	50,862,000		100.00
39	4.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Layanan Informasi Pelayanan Kepegawaian	12 Bulan	75,723,000	100.00	19,175,000	100.00	75,723,000		100.00
	4.03.01.01.15	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA	Peningkatan dan Pengembangan Aparatur		1,208,986,950	89.51	327,839,950	89.51	1,184,216,250		97.95

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
40	4.03.01.01.15.01	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golong IVa Keatas Pemkot/Pemkab	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS Gol. IV/a keatas di lingkungan pemkot/pemkab se-kalimantan barat	600 SK	152,509,600	96.95	56,023,300	96.95	147,862,500		96.95
41	4.03.01.01.15.02	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan SK Pensiun	350 SK	136,295,000	96.15	18,705,000	96.15	131,048,500		96.15
42	4.03.01.01.15.03	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Data SAPK di lingkungan Pemprov. Kalbar	11.588 PNS Pemprov Kalbar	75,980,650	98.27	24,056,400	98.27	74,667,900		98.27
43	4.03.01.01.15.04	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP Pegawai Negeri Sipil	11.588 berkas	77,747,000	0.00	0	98.57	76,637,000		98.57
44	4.03.01.01.15.05	Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)	Rekonsiliasi Data Simpeg Secara Berkala	11.588 Data PNS	56,755,250	97.97	55,605,250	97.97	55,605,250		97.97
45	4.03.01.01.15.06	Pembuatan Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Profil Kepegawaian	2 Jenis	38,921,800	100.00	34,845,000	100.00	38,921,800		100.00
46	4.03.01.01.15.07	Pemutahiran Data Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	11.588 PNS	52,621,200	97.72	12,165,000	97.72	51,421,200		97.72
47	4.03.01.01.15.08	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Proses Penyelesaian Administrasi Pindah PNS dan Alih Jenis	400 SK	110,401,200	98.55	18,705,000	98.55	108,802,300		98.55

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
48	4.03.01.01.15.09	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Penetapan Kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d ke atas PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	1000 Surat Penetapan	97,672,500	99.97	30,012,000	99.97	97,640,500		99.97
49	4.03.01.01.15.10	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Dokumen Kepegawaian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara	11.588 Dokumen PNS	130,521,900	99.08	14,085,000	99.08	129,321,900		99.08
50	4.03.01.01.15.11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	1400 SK	178,865,400	96.86	42,476,800	96.86	173,298,200		96.89
51	4.03.01.01.15.12	Pemberkasan dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar	Terselesainya Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar	334 CPNS	25,346,500	0.00	0	100.00	25,346,500		100.00
52	4.03.01.01.15.13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	Usulan Karis/Karsu	300 Karis/Karsu	75,348,950	97.74	21,161,200	97.74	73,642,700		97.74
	4.03.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Apartur		663,263,550	69.85	192,999,300	69.85	642,545,650		96.88
53	4.03.01.01.16.01	Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	Jumlah PNS yang Memasuki Masa Pensiun	250 Orang	69,091,000	100.00	37,250,000	100.00	69,091,000		100.00
54	4.03.01.01.16.02	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Terselenggaranya Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas	150 Orang	63,330,000	0.00	0	95.66	60,580,000		95.66
55	4.03.01.01.16.03	Pembinaan Rohani PNS	PNS yang di Berikan Pembinaan	135 Orang	55,819,200	0.00	0	100.00	55,819,200		100.00
56	4.03.01.01.16.04	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap PNS	12 Kasus	85,539,300	98.77	17,745,000	98.77	84,489,300		98.77

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
57	4.03.01.01.16.05	Penertipan Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar	Inspeksi/Penertiban Disiplin PNS	45 OPD	97,269,600	97.53	27,922,600	97.53	94,865,800		97.53
58	4.03.01.01.16.06	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	60 Laporan	54,527,250	98.79	21,424,000	98.79	53,866,350		98.79
59	4.03.01.01.16.07	Penyelesaian pengusulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya	Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan satya Lancana Karya Satya	2 Kali	63,988,000	0.00	0	98.23	62,858,100		98.23
60	4.03.01.01.16.08	Penyelesaian permohonan izin perceraiian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat	15 SK Gubernur	48,053,200	98.00	11,670,000	98.00	47,093,200		98.00
61	4.03.01.01.16.09	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Rumusan Kebijakan Kesejahteraan PNS	1 Dokumen	65,371,000	97.69	26,967,200	97.69	63,862,200		97.69
62	4.03.01.01.16.10	Sosialisasi Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Perserta Workshop Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	51 Orang	60,275,000	82.99	50,020,500	82.99	50,020,500		82.99
	4.03.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA	Terlaksananya Sidang/Rapat BAPERJAKAT		3,665,179,754	80.30	1,200,535,450	80.30	2,942,972,550		80.30
63	4.03.01.01.17.01	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT	Sidang/Rapat BAPERJAKAT	7 Kali / Laporan Baperjakat	152,255,000	81.97	53,229,400	81.97	124,769,400		81.95
64	4.03.01.01.17.03	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov.Kalbar	Fasilitasi administrasi dan bantuan beasiswa bagi PNS yang mengikuti tugas belajar di lingkungan Pemprov. Kalbar	31 orang	271,194,755	81.32	62,710,050	81.32	220,533,650		81.32

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
65	4.03.01.01.17.04	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN di setiap Kampus Pusat dan Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Praja IPDN di setiap Regional	2 Lokasi Kampus IPDN Regional	49,174,200	100.00	4,379,150	100.00	49,173,850		100.00
66	4.03.01.01.17.05	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengembalian Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan	6 Kali / Laporan Pelantikan	135,300,000	84.79	20,770,000	84.79	114,722,400		84.79
67	4.03.01.01.17.06	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional	Keputusan tentang Pengangkatan/Pembebasan Sementara/Pemberhentian/Kenaikan Jabatan/Penguksuhan/Penyesuaian Tunjangan dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional	400 orang	88,114,000	98.92	27,693,200	98.92	87,165,700		98.92
68	4.03.01.01.17.08	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	18 Orang Praja IPDN	74,997,700	100.00	0	100.00	74,997,700		100.00
69	4.03.01.01.17.09	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar di Lingkungan Pemprov.Kalbar	Terfasilitasinya urusan administrasi dan bantuan ijin belajar bagi PNS Pemprov. Kalbar	14 Orang	181,500,000	99.98	120,663,500	99.98	181,462,700		99.98
70	4.03.01.01.17.10	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar	Terfasilitasinya dewan pengurus KORPRI	1 Laporan	47,329,000	97.57	26,387,100	97.57	46,179,300		97.57
71	4.03.01.01.17.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemprov.Kalbar	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	6 Kali / Laporan Pelantikan	962,340,500	69.70	179,628,500	69.70	670,735,450		69.70
72	4.03.01.01.17.12	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Pelaksanaan program fasilitasi tugas belajar melalui seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	3 Orang	138,800,035	99.31	30,063,500	99.31	137,840,000		99.31

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
73	4.03.01.01.17.13	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	40 Orang	54,509,200	100.00	14,000,000	100.00	54,509,200		100.00
74	4.03.01.01.17.14	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov.Kalbar	Terfasilitasinya Kebijakan Pengembangan Kelembagaan	1 Tahun	36,580,250	88.12	5,822,600	88.12	32,233,100		88.12
75	4.03.01.01.17.15	Workshop Jabatan Fungsional	Workshop Tim Penilai Jabatan Fungsional	100 %	65,593,000	99.05	43,973,000	99.05	64,973,000		99.05
76	4.03.01.01.17.16	Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Pelaksanaan Fasilitas pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemprov. Kalbar	Eselon II : 6 Orang	520,117,500	85.45	251,316,150	85.45	444,453,650		85.45
77	4.03.01.01.17.18	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Peserta Pembekalan Tentang Kepegawaian Kepada CPNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	334	168,468,100	99.08	0	99.08	166,911,000		99.08
78	4.03.01.01.17.20	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional	4 Kali / Laporan Pelantikan	54,845,000	100.00	13,946,000	100.00	54,845,000		100.00
79	4.03.01.01.17.21	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Pemprov.Kalbar	SK Penetapan Penyesuaian Gelar Pendidikan PNS	25 SK	25,499,000	99.92	23,369,000	99.92	25,478,000		99.92
80	4.03.01.01.17.24	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan studi PNS tugas belajar	100 %	46,121,700	96.26	5,567,100	96.26	44,395,900		96.26
81	4.03.01.01.17.25	Fasilitasi Pekan Olah Raga Nasional KORPRI	Terfasilitasinya Pornas KORPRI	1 Laporan	128,302,000	97.97	121,698,800	97.97	125,698,800		97.97

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	
				K	Rp	IV		8+9+10+11		12/7 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
82	4.03.01.01.17.26	Fasilitasi Peyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendaftara Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	1 (satu) Dokumen	33,782,350	99.91	7,174,900	99.91	33,751,250		99.91
83	4.03.01.01.17.27	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalbar	Pelamar CPNS	7500	430,356,464	43.72	188,143,500	43.72	188,143,500		43.72

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 umumnya menunjukkan kinerja yang memuaskan baik pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar maupun dengan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2019. Dengan rerata capaian indikator sebesar **62,65%** dengan persentase tingkat keberhasilan sebesar **106,19%** untuk capaian IKU. Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah sesuai dengan harapan pada tahun 2019. Namun kedepannya diperlukan konsistensi dan upaya lebih dalam pencapaian target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Capaian indikator tersebut mengacu pada RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023 serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih sebelumnya. Pada Tahun 2019 juga merupakan tahun awal penerapan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah ditandatangani bersama Gubernur Terpilih.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 akan dilihat pada pencapaian indikator dan analisisnya pada IKU Dinas Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar. Capaian kinerja utama TA 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2019		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1	Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	59,00	62,65	106,19
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1						106,19

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2020.

- **Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan**

Indikator tersebut merupakan penjabaran dari misi ke 2 Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance” yang telah mengalami perubahan terhadap indikator sebelumnya yang disebabkan oleh hasil dari evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut tidak lepas dari adanya peningkatan terhadap jumlah jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Rumus perhitungan dari indikator tersebut diperoleh melalui persentase perbandingan antara jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi jabatan (struktural dan fungsional) dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun kedepannya hal yang perlu menjadi perhatian yaitu masih kurang menariknya Jabatan Fungsional bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baik yang disebabkan oleh kurangnya informasi terkait dengan Jabatan Fungsional, sulitnya pencapaian angka kredit Jabatan Fungsional, maupun minimnya anggaran instansi untuk mengikuti diklat serta uji kompetensi dalam rangka pengembangan karir jabatan fungsional.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya mensosialisasikan Jabatan Fungsional dalam pengembangan karir ASN, mendorong OPD untuk mengalokasikan penganggaran dalam rangka pengembangan karir jabatan fungsional, serta mendorong ASN untuk mengikuti diklat serta beralih menjadi pejabat fungsional dimana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan persentase aparatur yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2019 merupakan tahun awal penggunaan indikator yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023 maupun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar 2018-2023 dimana pada Tahun 2018 masih menggunakan indikator yang tertuang pada periode Renstra sebelumnya. Indikator kinerja serta pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kalbar beserta pencapaiannya pada tahun 2017 dan 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2017– 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi					
					2017		2018		2019	
					T	R	T	R	T	R
1	2	3		4	5		6		7	
1	MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA	1.1	Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	-	-	-	54,00	59,00	62,65

Keterangan : T = Target ; R = Realisasi

Sumber : Resntra BKD Prov. Kalbar 2018-2023.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Melakukan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicitakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau

lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
- b. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Penerapan E-Government;
- d. Belum maksimalnya penerapan Sistem Penilaian Kinerja secara berbasis elektronik;
- e. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ; Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualiatas pelayanan Internal

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manejerial;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui beasiswa tugas belajar ;

3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun

Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun sebagai tahun ketiga pencapaian RPJMD Kalbar 2018-2023 yang telah mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Namun terdapat penyesuaian antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan Renja OPD Tahun 2021 dimana dalam penyusunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal, adil dan merata bagi masyarakat dengan penganggaran yang efisien.

Namun dalam proses yang telah berlangsung, terdapat perubahan pada kegiatan serta penganggaran sehingga terdapat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan Renja Tahun 2021 yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2021

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				8,873,790,300
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD			1,374,627,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat	192 Berkas	Pontianak	4,800,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi	1 Rekening	Pontianak	25,000,000
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa perizinan kendaraan dinas	6 Unit	Pontianak	6,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku cek	2 Item	Pontianak	9,800,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	54 Jenis	Pontianak	88,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	2 item	Pontianak	148,600,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Item	Pontianak	13,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	8 Item	Pontianak	71,000,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Item	Pontianak	15,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Item	Pontianak	27,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman	1050 Porsi	Pontianak	80,000,000
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kali Perjalanan	Dalam dan Luar Daerah	260,000,000
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	12 Orang	Pontianak	381,127,500
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang	13 Orang	Pontianak	96,300,000
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	10 Item	Pontianak	14,000,000
Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang ditata	2000 Arsip	Pontianak	70,000,000
Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jenis informasi SKPD media cetak dan elektronik	12 Item	Pontianak	65,000,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				443,700,000
Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas angin	2 Unit	Pontianak	20,000,000
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor	12 item	Pontianak	112,600,000
Pengadaan Saranan dan Prasaran Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana prasarana studio dan komunikasi	2 Item	Pontianak	20,000,000
Pengadaan Sarana/Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana/Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	Pontianak	40,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas, kendaraan jabatan/operasional yang terpelihara	3 Unit	Pontianak	50,100,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	84 Unit	Pontianak	36,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	78 Unit	Pontianak	45,000,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Server	Pontianak	120,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur			75,900,000
Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan	85 Stel	Pontianak	75,900,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			369,410,500
Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	Dalam dan Luar Daerah	140,000,000
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	15 Orang	Pontianak	65,000,000
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	12 DUPAK	Pontianak	82,112,000
Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan	1 Dokumen	Pontianak	33,466,000
Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan kinerja	2 Dokumen	Pontianak	15,957,500
Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen SOP	1 Dokumen	Pontianak	32,875,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu			475,824,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan	1 Dokumen	Pontianak	49,981,000
Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip	1 Dokumen	Pontianak	23,000,000
Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	Pontianak	41,496,000
Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen	Pontianak	29,221,000
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Pontianak	29,396,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Pelaporan	1 Dokumen	Pontianak	92,435,000
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	4 Dokumen	Pontianak	31,613,000
Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	Pontianak	93,456,000
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan data, informasi dan dokumentasi	1 Dokumen	Pontianak	85,226,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah			40,984,000
Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah Inventarisasi Aset	2 laporan	Pontianak	40,984,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN			3,776,352,000
Pelaksanaan Sidang / Rapat BAPERJAKAT	Jumlah Sidang/rapat Baperjakat	7 Kali	Pontianak	146,027,000
Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas belajar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar	3 Dokumen	Yogyakarta, Jakarta dan Bandung	34,039,000
Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa Untuk mengikuti Tugas Belajar	11 Orang	Pontianak	146,630,000
Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Jumlah Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JPT,Administrator dan Pengawas	6 Kali	Prov. Kalbar	135,483,000
Penyelesaian Administrasi Dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	400 orang	Prov. Kalbar	136,042,000
Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat melalui CAT	100 PNS	Pontianak	106,490,000
Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Praja yang mendapatkan bantuan Skripsi dan Wisuda	20 Orang	Pontianak	86,248,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar di lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah PNS yang Mendapat bantuan Ijin Belajar	83 Orang	Pontianak	311,345,000
Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar	Jumlah Kegiatan Dewan Pengurus Provinsi Korpri	2 Item	dalam dan Luar daerah	90,980,000
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	6 JPT	Pontianak	664,879,000
Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	1 Kali	Pontianak	77,705,000
Pelatihan Penyusunan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Workshop teknik penyusunan Dupak Jabatan Fungsional	100 Orang	Pontianak	107,916,000
Pembekalan bagi CPNS di lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta pembekalan CPNS di lingkungan Pemprov, Kalbar	300 CPNS	Pontianak	159,347,000
Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Jumlah Keputusan tentang pengangkatan/pembebasan sementara/pemberhentian/kenaikan jabatan/penguksuhan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional	4 Kali	Pontianak	52,356,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK penetapan penyesuaian gelar pendidikan PNS	20 SK	Pontianak	35,939,000
Fasilitasi Penyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendaftaran Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021	1 Dokumen	Pontianak	35,572,000
Seleksi, Penetapan dan Pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Jumlah Peningkatan Kompetensi PNS melalui tugas belajar	5 Orang	Pontianak	103,019,000
Penyelesaian Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV dan Pelatihan Dasar CPNS serta Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan latihan dasar CPNS	186 Orang	Pontianak	621,533,000
Inventarisasi dan Pemetaan Kompetensi Manajerial ASN di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS Potensial yang mengikuti Inventarisasi dan Pemetaan Potensi	300 Orang	Pontianak	179,157,500
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional	12 OPD	Dalam dan Luar daerah	104,920,000

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rakor	100 Orang	Pontianak	125,954,000
Pengambilan Sumpah/Janji PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS yang diambil Sumpah/Janji	350 Orang	Pontianak	30,000,000
Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja	10 SK	Pontianak	43,699,000
Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemprov Kalbar	Jumlah Dokumen Formasi ASN Pemprov.Kalbar	1 Dokumen	Pontianak	86,268,000
Fasilitasi Pekan Olahraga Nasional KORPRI	Jumlah keikutsertaan pada Pekan Olahraga Nasional KORPRI	1 Kegiatan	Pontianak	154,803,500
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara			684,443,200
Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun	350 Orang	Pontianak	75,899,500
Pembekalan Menjelang Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang diberikan Pembekalan	250 Orang	Pontianak	82,156,500
Pembinaan Rohani PNS	Jumlah PNS yang diberikan pembinaan Kerohanian	135 Orang	Pontianak	66,925,600

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS	10 Kasus	Pontianak	97,505,500
Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD yang dilakukan Inspeksi/penertiban disiplin PNS	45 OPD	Pemprov.Kalbar	84,915,300
Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Jumlah LHKPN	900 Laporan	Pontianak	75,068,500
Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan kepada PNS yang Menerima SLKS	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan	400 Orang	Pontianak	75,121,500
Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat	15 SK	Pontianak	52,499,000
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Jumlah kebijakan yang disusun	1 Dokumen	Pontianak	74,351,800
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Layanan Administrasi dan Informasi Yang Diberikan			1,632,549,100

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Gol. IV/a Keatas Pemkot/Pemkab	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS Gol IV/a keatas di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota Se Kalbar	450 SK	Pontianak	140,950,000
Pelayanan Administrasi kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian PNS Dengan Hak Pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat pengabdian dan SK pensiun	350 PNS	Pontianak	120,000,000
Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar	11062 Data PNS	Pontianak	69,349,000
Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	11062 Berkas	Pontianak	65,313,000
Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg	Jumlah Data rekon simpeg secara berkala	11062 Data PNS	Pontianak	90,039,000
Pembuatan Profil Kepegawaian Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Profil Kepegawaian	2 item	Pontianak	60,421,000
Pemuktahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS Pemprov.Kalbar yang terdata	11062 PNS	Pontianak	57,185,000
Pelayanan Mutasi Pindah PNS Dan Alih Jenis Kepegawaian	Jumlah PNS yang mendapatkan SK mutasi pindah dan alih jenis kepegawaian PNS	400 PNS	Pontianak	127,953,500

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021				
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang ditetapkan kenaikan gaji berkala /KGB PNS golongan ruang III d keatas atau PNS dilingkungan pemprov.Kalbar	1000 PNS	Pontianak	121,526,500
Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Jumlah Dokumen kepegawaian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara	11062 Dokumen	Pontianak	107,061,000
Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	1250 SK	Pontianak	278,380,500
Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Usulan Karis/Karsu	300 kartu	Pontianak	78,795,600
Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	1 Aplikasi	Pontianak	272,289,000
Perubahan Status CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS yang mengalami Perubahan Status	333 Orang	Pontianak	23,286,000
Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) PNS Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Karpeg Yang Diterbitkan	340 Kartu	Pontianak	20,000,000

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Lelang Jabatan merupakan langkah yang dilakukan pemerintah menjamin pejabat mendapatkan posisi sesuai dengan kompetensinya. Pelaksanaan lelang jabatan pada Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilaksanakan 2 kali yaitu tahun 2017 untuk mengisi 5 Jabatan Tinggi pratama yang kosong dan pada tahun 2018 untuk mengisi 11 Jabatan Tinggi Pratama yang lowong. Sebagai bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari KKN, pelaksanaan lelang jabatan harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan senantiasa berpedoman kepada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kebutuhan daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dituangkan pada Rencana Kerja tahun 2021 sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada Misi ke- 2 yaitu : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-**

prinsip Good Governance yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

Sedangkan BKD Prov. Kalbar dalam Renja Perubahan Tahun 2021 sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan BKD Prov. Kalbar 2018-2023 fokus pada **penempatan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku** dimana target pada tahun 2021 sebesar **67%**.

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Isu-isu penting, RKPD Perubahan Tahun 2021 dan tujuan serta sasaran Tahun 2021, maka Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar pada tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) program yang terdiri dari 12 (duabelas) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu indikatof Tahun 2021 sebesar Rp.16.581.361.247,- dimana pagu tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2021.

Rencana Program beserta Pagu indikatif tersebut telah disusun dengan alokasi penganggaran per program sebagai berikut :

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** yang memiliki 9 (Sembilan) kegiatan dengan total rencana pendanaan

sebesar Rp.12.465.485.365,- dimana anggaran tersebut juga telah mengakomodir pembayaran gaji ASN BKD Provinsi Kalimantan Barat; dan

- PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH yang memiliki 4 (empat) kegiatan dengan total rencana pendanaan sebesar Rp.4.115.875.882,-.

Penyusunan tersebut telah mengikuti rencana program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana pada Rencana Kerja Sebelum Perubahan masih mengikuti hasil pemetaan yang terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Perubahan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator inputs, outputs dan outcomes, juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan.

Dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang telah disusun pada tahun 2020, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar baik untuk Indikator Kinerja Utama (Indikator Eselon II), Indikator Kinerja Program (Indikator Eselon III), dan Indikator Kinerja Kegiatan (Indikator Eselon IV)

Selanjutnya penjabaran Perubahan program/kegiatan, pendanaan, serta target kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat pada **lampiran** Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini.

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar Tahun 2021 memuat kebijakan program dan kegiatan yang berorientasi pada Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Renja sebagai pedoman bagi BKD Prov. Kalbar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah Pembinaan Gubernur Kalimantan Barat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu terkait dengan adanya perubahan terhadap kebijakan yang terjadi serta dinamika social ekonomi yang tengah terjadi pada masyarakat sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat berjalan secara maksimal prosenya baik yang disebabkan oleh **merebaknya Virus Covid-19** ataupun permasalahan lainnya.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat di jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan agar Renja Perubahan Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan DPA Perubahan OPD tahun 2021 serta dapat pula digunakan oleh segenap *stakeholders* dan sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Lampiran 1. Rencana Kerja Perubahan BKD. Prov. Kalbar TA. 2021

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03	KEPEGAWAIAN			17.429.631.472			16.581.361.247
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11.762.519.186			12.465.485.365
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			118.949.095			57.849.095
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	27.209.510	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	10.809.510
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	26.292.661	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.492.661
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	43.779.955	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	15.079.955
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.666.969	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.466.969
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.785.103.322			10.498.473.261
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	9.158.785.601	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	9.906.615.540
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	3 Dokumen	579.457.120	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	3 Dokumen	573.697.120

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	2 Laporan	46.860.601	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	2 Laporan	18.160.601
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			18.192.671			5.892.671
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	18.192.671	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.892.671
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			110.119.669			19.419.669
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	23.144.954	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.844.954
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu	80 Dokumen	22.269.715	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu	80 Dokumen	5.869.715
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Minimal 20 JP	15 Orang	39.910.000	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Minimal 20 JP	3 Orang	1.870.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Jumlah Sosialisasi	2 Orang	9.880.000	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Jumlah Sosialisasi	1 Orang	550.000

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	10 Orang	14.915.000	Jumlah Peserta Bimtek	1 Orang	285.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			678.594.371			655.187.646
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 item	17.064.770	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 item	17.064.770
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	99.933.525	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	99.933.525
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis	103.760.851	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	127.718.531
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30 Jenis	160.738.310	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30 Jenis	145.625.525
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	30.000.000	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	30.000.000
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	100 %	99.000.000	Persentase Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	100 %	88.500.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Kali	89.732.016	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Kali	125.380.396
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang diolah	5 Jenis	39.181.338	Jumlah arsip yang diolah	5 Jenis	10.481.338

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem yang Dikelola	10 Sistem Informasi	39.183.561	Jumlah Sistem yang Dikelola	10 Sistem Informasi	10.483.561
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			611.628.410			755.283.010
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	54 Buah	114.192.950	Jumlah Pengadaan Mebelair	54 Buah	114.622.950
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Item	497.435.460	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Item	640.660.060
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			142.224.783			125.155.348
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Dikirim	50 berkas	2.466.355	Jumlah Surat Menyurat yang Dikirim	50 berkas	2.466.355
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	25.000.000	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	25.000.000
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	114.758.428	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	97.688.993

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297.706.865			348.224.665
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Disediakan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	56.093.365	Jumlah Kendaraan yang Disediakan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	67.729.165
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan yang dipelihara	150 unit	241.613.500	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan yang dipelihara	176 unit	280.495.500
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			5.667.112.286			4.115.875.882
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.076.703.096			1.029.465.689
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	89.978.552	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	75.850.552
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CASN serta seluruh rangkaian pengadaan	7000 Orang	237.530.065	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CASN serta seluruh rangkaian pengadaan	1760 Orang	544.826.050
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	150.552.451	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	134.474.451

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Pengurus Korpri	1 Laporan	238.411.004	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Pengurus Korpri	1 Laporan	113.793.212
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	42.947.966	Jumlah Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	747.966
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem Informasi Kepegawaian yang Dikelola	1 Sistem informasi	76.585.438	Jumlah sistem Informasi Kepegawaian yang Dikelola	1 Sistem informasi	21.286.438
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian	100 %	180.931.872	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian	100 %	131.306.272
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	59.765.748	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.180.748
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.917.993.311			1.487.270.672
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	119.997.113	Jumlah Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	81.974.113
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	415.962.995	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	363.350.264
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	8 Dokumen	1.382.033.203	Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	8 Dokumen	1.041.946.295
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			2.082.211.593			1.212.187.403

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1 Dokumen	219.271.663	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1 Dokumen	26.954.849
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Kompetensi dan Potensi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	200 Dokumen	106.449.389	Jumlah Dokumen Kompetensi dan Potensi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	200 Dokumen	185.276.621
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan fasilitasi administrasi penetapan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Latihan Dasar CPNS di lingkungan Pemprov. Kalbar	10 Dokumen	707.931.497	Jumlah Dokumen Pelaksanaan fasilitasi administrasi penetapan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Latihan Dasar CPNS di lingkungan Pemprov. Kalbar	10 Dokumen	613.722.397
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Lanjutan PNS Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	30 Dokumen	772.196.544	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Lanjutan PNS Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	30 Dokumen	220.155.544
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Kerjasama Instansi Pembina Penyelenggara Diklat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pelaksanaan Diklat bagi ASN Pemprov Kalbar	1 Dokumen	10.976.568	Jumlah Dokumen Kerjasama Instansi Pembina Penyelenggara Diklat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pelaksanaan Diklat bagi ASN Pemprov Kalbar	0 Dokumen	-

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional	2 Kegiatan	47.784.692	Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional	2 Kegiatan	31.159.517
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional	3 Dokumen	165.060.557	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	75.383.067
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang Dilakukan Pengangkatan, Pelantikan, Kenaikan, Alih Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional	400 Orang	52.540.683	Jumlah Pejabat Fungsional yang Dilakukan Pengangkatan, Pelantikan, Kenaikan, Alih Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional	1500 Orang	59.535.408
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			590.204.286			386.952.118
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	17.444.302	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	17.444.302
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penyampaian Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	100 %	11.153.466	Persentase Penyampaian Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	100 %	11.153.466
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai yang diberikan penghargaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat/Kabupaten/Kota	400 Orang	191.811.646	Jumlah Pegawai yang diberikan penghargaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan	400 Orang	82.974.278

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN		
KODE	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (DPA 2021)	Indikator	Target	Anggaran (DPA Perubahan 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Barat/Kabupaten/Kota		
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	265.602.194	Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	200.174.694
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK penyelesaian pelanggaran disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	10 SK	104.192.678	Jumlah SK penyelesaian pelanggaran disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	10 SK	75.205.378